

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RECEPTION LEVIES AND THE CONTRIBUTION TO THE
INCREASE IN LOCAL REVENUE (PAD) IN THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI*

Oleh :
Mega Ersita¹
Inggriani Elim²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

Email : ¹mega_e64@yahoo.com
²e_inggriani@yahoo.com

Abstrak : Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang dalam menggali potensi daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerimaan Retribusi dari sumber PAD khususnya retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi utara tahun 2011-2015 dan bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah retribusi daerah, Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas dan Kontribusi. Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik.

Kata kunci : *pendapatan asli daerah, retribusi daerah, efektivitas, kontribusi*

Abstract : *The Era of Decentralization and Regional Autonomy is a challenge for every region to take advantage of opportunities in exploring the region. Efforts to increase local revenue (PAD) can be done by increasing the effectiveness of Retribution acceptance of the potential sources of revenue, especially levies. The study aims to determine how the effectiveness of Levies in northern Sulawesi province in 2011-2015 and how Contributions Levies to PAD in Sulawesi Utara (North Sulawesi) 2011-2015. This research uses descriptive quantitative method. The technique of collecting data through documentation and interviews. The data used is retribution, the data analysis used in this research is the analysis of the effectiveness and contribution. The results showed that the effectiveness rate for the levies during the years 2011-2015 in the category of Effective enough. Contributions levies PAD SULUT province of the years 2011-2015 contributed to moderate but its contribution ratios tend to rise each year only in 2015 has decreased. Leaders Dispenda SULUT province should continue to optimize revenue collection by the intensification and extension, so there will always be changes in the reception system levies a better direction.*

Keywords: *original regional income, local retribution, effectiveness, contribution*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan kedalam suatu laporan tugas akhir dengan judul berjudul analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi sulawesi utara.

Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misalnya sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Provinsi Sulawesi Utara ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Dengan adanya tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sulawesi Utara yang lebih besar diharapkan daerah ini tidak akan lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat melalui dana bagi hasil.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah tersebut salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah adalah meningkatkan PAD.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Mengetahui Kontribusi efektivitas Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Konsep Retribusi Daerah

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli. Mardiasmo (2014: 15) dalam bukunya mendefinisikan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Siahaan (2010:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat (28) menyatakan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Golongan Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi jasa umum
Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi jasa usaha
Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - j. Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan tertentu
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek.

Perhitungan Retribusi Daerah

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 ayat 1 menyatakan besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

$$\text{Retribusi Terhutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Konsep Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Retribusi daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Kontribusi

Halim (2010: 163) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Penelitian Terdahulu

Mosal (2013) dengan penelitian mengenai Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Manado. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengukur tingkat efektivitas dan mengukur kontribusi terhadap PAD. Taluke (2013) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Halmahera Barat. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengukur pajak daerah dan retribusi daerah.

MOTEDE PENELITIAN

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (Kuncoro 2009:12). Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa. Dalam hal ini menggambarkan efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan waktu penelitian mulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan Februari 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mencari literatur –literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Mengolah dan analisis data yang sudah diperoleh.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan objek penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan mendapatkan data berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2011-2015.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efektivitas penerimaan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Halim (2010:220) menjelaskan data yang akan diteliti dari efektivitas penerimaan retribusi daerah berupa :

- a. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

Besarnya peningkatan efektivitas pajak parkir dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

- b. Analisis Kontribusi

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100 \%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskriptif Perusahaan

PAD Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari sumber-sumber penerimaan berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari sumber-sumber pendapatan tersebut maka terbentuklah PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)
2011	516.084.886.250	535.087.974.492
2012	599.269.276.250	633.307.258.500
2013	764.063.464.750	785.467.967.366
2014	991.101.010.028	937.044.549.692
2015	1.089.288.358.000	1.012.692.276.656

Sumber : Data hasil olahan, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa PAD Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan selama tahun 2011-2014. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 535.087.974.492. Pada tahun 2012 Rp. 633.307.258.500. pada tahun 2013 Rp. 785.467.967.366. pada tahun 2014 sebesar Rp. 937.044.549.692 . Pada tahun 2015 realisasi penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.012.692.276.656.

Tabel 3. Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Anggaran	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)
2011	6.569.821.500	8.101.686.176
2012	16.970.811.500	14.586.071.775
2013	36.350.000.000	22.360.933.010
2014	36.855.300.000	34.275.348.981
2015	50.626.825.000	54.023.297.875

Sumber : Data hasil olahan, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 8.101.686.176. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 14.586.071.775. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 22.360.933.010. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 34.275.348.981. Sampai Pada tahun 2015 realisasi penerimaan retribusi daerah selalu mengalami peningkatan sebesar Rp. 54.023.297.875.

Pembahasan

Tingkat efektivitas Retribusi Daerah yang terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu di Provinsi Sulawesi Utara dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah. Apabila perhitungan efektivitas Retribusi Daerah menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100%, maka Retribusi Daerah efektif atau maka kinerja pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara semakin baik. Dibawah ini hasil perhitungan efektifitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2011-2015.

Tabel 4. Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Anggaran	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi daerah (Rp)	Efektivitas Retribusi Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2011	6.569.821.500	8.101.686.176	123,32 %	Sangat efektif
2012	16.970.811.500	14.586.071.775	85,95 %	Cukup efektif
2013	36.350.000.000	22.360.933.010	61,52 %	Kurang efektif
2014	36.855.300.000	34.275.348.981	93,00 %	Efektif
2015	39.679.200.000	27.676.040.651	69,75 %	Kurang efektif
Rata-rata			86,708 %	Cukup Efektif

Sumber : Data hasil olahan, 2016

Tabel 4 menunjukkan bahwa efektivitas Retribusi Daerah setiap tahunnya mengalami perubahan. Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Penelitian ini kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan retribusi daerah dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Anggaran	Jenis Retribusi Dinas Pendapatan Daerah	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2011	Retribusi Daerah	8.101.686.176	535.087.974.492	15,14%
	Retribusi Jasa Umum	3.524.175.596	535.087.974.492	0,65%
	Retribusi Jasa Usaha	4.025.535.455	535.087.974.492	0,75%
	Retribusi Perizinan Tertentu	551.975.125	535.087.974.492	0,10%
2012	Retribusi Daerah	14.586.071.775	633.307.258.500	23,03%
	Retribusi Jasa Umum	11.405.469.584	633.307.258.500	1,80%
	Retribusi Jasa Usaha	2.545.007.191	633.307.258.500	0,40%
	Retribusi Perizinan Tertentu	635.595.000	633.307.258.500	0,10%
2013	Retribusi Daerah	22.360.933.010	785.467.967.366	28,46%
	Retribusi Jasa Umum	19.837.246.667	785.467.967.366	2,52%
	Retribusi Jasa Usaha	1.194.601.318	785.467.967.366	0,15%
	Retribusi Perizinan Tertentu	529.085.025	785.467.967.366	0,06%
2014	Retribusi Daerah	34.275.348.981	937.044.549.692	36,57%
	Retribusi Jasa Umum	31.484.587.743	937.044.549.692	3,35%
	Retribusi Jasa Usaha	2.293.422.613	937.044.549.692	0,24%
	Retribusi Perizinan Tertentu	497.338.625	937.044.549.692	0,05%
2015	Retribusi Daerah	27.676.040.651	1.012.692.276.656	27,32%
	Retribusi Jasa Umum	25.109.590.246	1.012.692.276.656	2,47%
	Retribusi Jasa Usaha	2.104.331.905	1.012.692.276.656	0,20%
	Retribusi Perizinan Tertentu	462.118.500	1.012.692.276.656	0,04%
Rata-rata				26,104%

Sumber : Data hasil olahan, 2016

Hasil perhitungan diatas kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara terlihat jelas pada tabel 5. Pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami perkembangan sampai 8 %. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami perkembangan lagi sebesar 8 % , tetapi pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 9 % hal ini

disebabkan menurunnya penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,104 %.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Efektivitas retribusi daerah Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami perkembangan sampai 8 %. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami perkembangan lagi sebesar 8 % , tetapi pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 9 % hal ini disebabkan menurunnya penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,104 %.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara disarankan terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD sendiri. Serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan retribusi daerah.
2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektifitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan setiap anggaran retribusi daerah diharapkan bisa efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dihimbau agar lebih memprioritaskan retribusi daerah untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Edisi 3, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Dua*. UPP STIM. YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mosal, Maurin M. 2013. Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No.4 Desember 2013, <http://www.unsrat.ac.id> diakses 7 Maret 2016. Hal 374-382.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 151 ayat (1) *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP - STIM YKPN, Yogyakarta.

Taluke, Maxwel. 2013. Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal EMBA* Vol 1 No 3 Desember 2013, <http://www.unsrat.ac.id> diakses 18 Februari 2016. Hal 385-393.

Warsito. 2011. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Semesta Media, Jakarta.

